

SKRIPSI

**PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA
DALAM OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
(STUDI KASUS PADA DESA SENAYAN
KECAMATAN POTO TANO KABUPATEN
SUMBAWA BARAT)**

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



Oleh

RAHMATULLAH
NIM. 218110055

**JURUSAN URUSAN PUBLIK
KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENEGEMBAN KAPASITAS APARATUR DESA
DALAM OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
(Studi Kasus Pada Desa Senayan Kecamatan Poto Tano
Kabupaten Sumbawa Barat)**

Oleh :

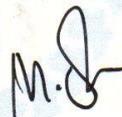
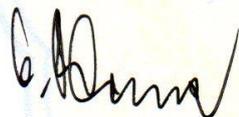
RAHMATULLAH

Untuk memenuhi ujian skripsi
Tanggal 10 Februari 2022

Menyetujui
Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H. Abdurrahaman, M.M.
NIDN. 0804116101

M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP., M.IP
NIDN. 0031126484

Mengetahui,

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP.

NIDN : 0822048901

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA
DALAM OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
(Studi Kasus Pada Desa Senayan Kecamatan Poto Tano
Kabupaten Sumbawa Barat)**

Oleh :

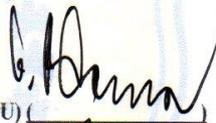
RAHMATULLAH

218110055

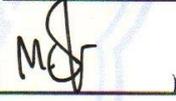
Telah dipertahankan di depan penguji
Pada Tanggal 10 Februari 2022
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

1. Drs. H. Abdurrrhman, M.M
NIDN. 0804116101

(PU) 

2. M. Ufatul Akbar Jafar, S. AP., M. IP
NIDN. 0031126484

(PP) 

3. Ayatullah Hadi, S. IP., M.IP
NIDN. 0816057902

(PN) 

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmatullah

Nim : 218110055

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik, baik di UNIVERSITAS MUHAMMIDIYAH MATARAM maupun diperguruan tinggi lainnya, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 Ayat 2 dan pasal 70).

Mataram, 10 Februari 2022

Mahasiswa



Rahmatullah
218110055



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMATULLAH
NIM : 21810055
Tempat/Tgl Lahir : SENAYAN, 31. DESEMBER, 1996
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
Fakultas : FISIPOL
No. Hp : 082 334 157 947
Email : rahmatullahherfi294@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM OPTIMASASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. (STUDI KASUS PADA DESA SENAYAN KECAMATAN POTO TANO KABUPATEN SUMBAWA BARAT.)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 28%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 01, MARET,2022

Penulis



RAHMATULLAH
NIM. 21810055

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMATULLAH
NIM : 210110055
Tempat/Tgl Lahir : SENAYAN, 31 Desember, 1996
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 082339157992
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM OPTIMALISASI
PENYELANGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (STUDI
KASUS pada Desa Senayan Kecamatan Poto KSB)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 01 MARET2022
Penulis



RAHMATULLAH
NIM. 210110055

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Nasir S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

LUKA YANG MONGERING DAN MENJADI KULIT

JANGAN DIKOREK NAMUN JADIKAN

SEBAGAI PENGUAT DIRIMU

UNTUK

MELANGKAH KEDEPAN



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah, sungguh tiada tuhan selain Allah. Dengan penuh ketundukan dan rasa syukur yang terdalam dengan segenap cinta, saya persembahkan karya ini kepada mereka yang telah mewarnai dan memberikan makna dalam kesempatan hidupku.

Kedua orang tua kandung saya yang tercinta Bapak Sulaiman Almarhumah dan ibu kandung saya Ibu Istiharah yang tidak pernah kurang memberikan kasih sayangnya, sebagai tanda bukti dan terimakasih yang tiada terhingga yang telah memberikan do'a serta dukungan, kesempatan untuk melanjutkan kuliah, serta pengorbanan dan kasih sayang sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Saudara saya Maenah, Syamsudin, M. Ridwan serta Sumiati serta keponakan saya fauzan dan Rahmatullah, S. AP, calon istri saya yang setia membantu, memberikan semangat, nasehat dukungan saran untuk menyelesaikan skripsi ini.

Kepada semua teman-teman saya teman kelas jurusan Administrasi Publik teman satu angkatan dan untuk almamater universitas Muhammadiyah Mataram dan orang-orang yang tidak bisa saya sebut satu persatu saya ucapkan banyak terimakasih atas dukungannya selama saya mengerjakan skripsi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh...

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat RahmatNya penulis dapat menyelesaikan proposal ini tepat pada waktunya, yang berjudul **“Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Pada Desa Senayan Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat)”** walaupun dalam bentuk yang sederhana.

Proposal ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram. Keberhasilan penulisan proposal ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung peneliti baik moril dan materil. Maka dengan ketulusan hati, saya selaku penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik.
4. Dr. H. Abdurrahman, M.M. selaku Dosen Pembimbing I.
5. M. Ulufatul Akbar Jafar, S.AP, M.IP selaku Dosen Pembimbing II.
6. Para dosen yang telah memberikan ilmu, membimbing serta didikan yang sangat berharga selama masa perkuliahan di Program Studi S1 Ilmu Administrasi Publik, FISIPOL, Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Orang tua beserta keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil bagi penulis agar dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan baik.

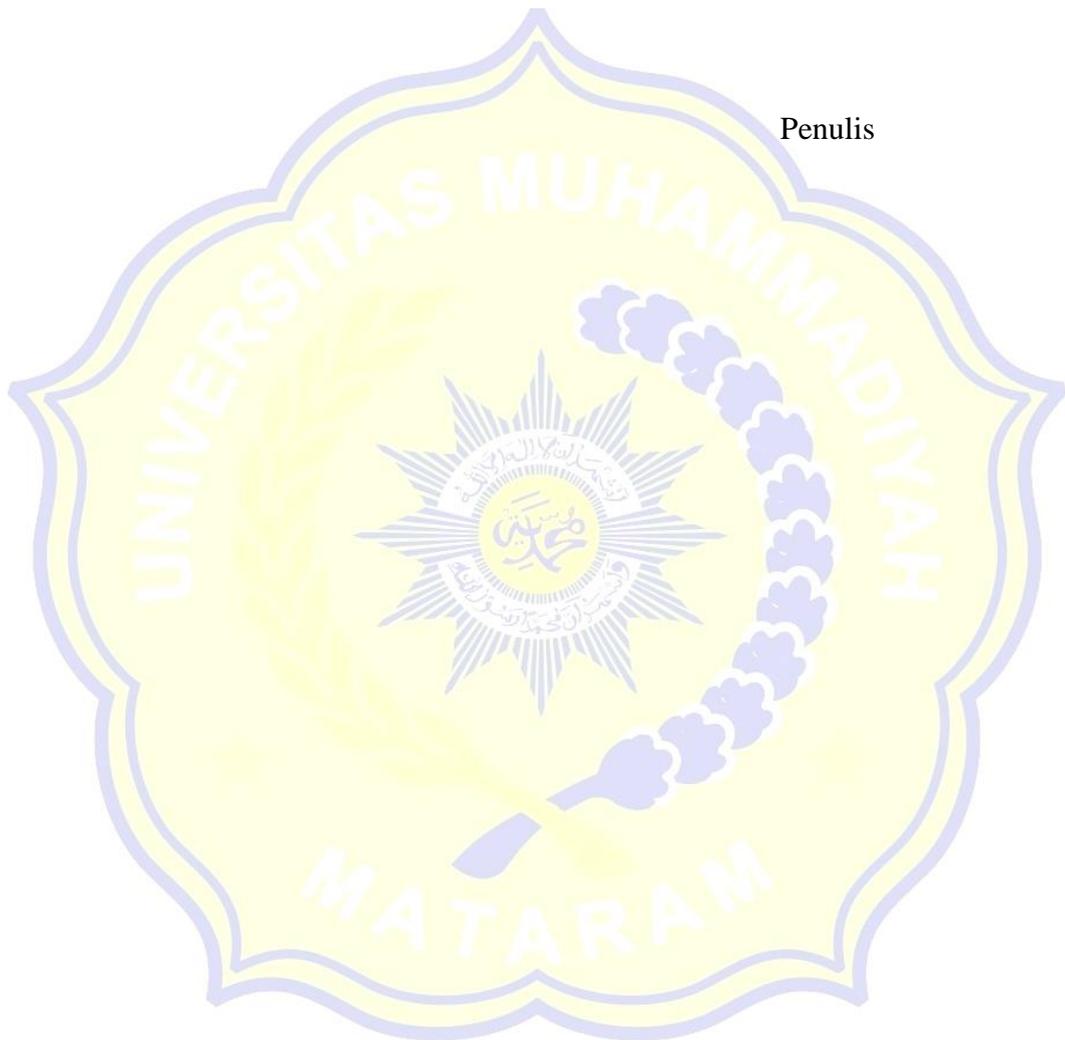
Mohon maaf atas segala kekurangan dalam proposal ini. Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga saran dan

masukkan yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat penulis hargai. Akhir kata penulis menaruh harapan besar semoga proposal ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh...

Mataram, 13 November 2020

Penulis



**PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM
OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
(STUDI KASUS PADA DESA SENAYAN KECAMATAN POTO TANO
KABUPATEN SUMBAWA BARAT)**

Rahmatullah¹, M. Ulfatul Akbar Jafar², H. Abdurrahman³
Mahasiswa¹, Pembimbing², Pembimbing Utama³
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Pada Desa Senayan Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat). Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif, dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan informan dalam penelitian ini, Kepala Desa Senayan, Sekdes Senayan, Staf Desa Senayan, Ketua BPD, Masyarakat Desa Senayan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengembangan Kapasitas Aparatur desa Dalam Optimalisasi Penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan dalam variabel Keterampilan, Kemampuan dan Pengelompokan Kerja Aparatur Desa sudah cukup baik dan sudah sesuai dengan SOP yang berlaku walaupun masih belum optimal terutama dalam keterampilan membuat dan mengganti papan syarat pembuatan KTP, KK serta papan data penduduk masyarakat desa Senayan, dan tidak adanya Peta Desa Atau Slogan Lainnya, dan dalam pembuatan absen kehadiran perangkat Desaupun tidak diterapkan dengan baik, sehingga memudahkan untuk seluruh dari Aparatur Desa Tersebut membuat kesalahan dengan datang terlambat dan Pulang tidak sesuai dengan jam kerja. Dalam hal ini pula dijelaskan bahwa variabel etika yang kurang baik dan kurang mampu memberikan pelayanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat yang membutuhkan terutama tidak adanya absen yang mengontrol mereka untuk datang dan pulang tepat waktu dan dalam memberikan pelayananpun tidak begitu ramah sehingga dalam Keterampilan juga aparatur desa Senayan dalam melaksanakan tugasnya ketika ada masyarakat yang akan membuat semacam surat menyurat, pembuatan KTP, KK tidak langsung dibuatkan namun masih menunda-nunda atau ditumpuk, sehingga pekerjaan yang sehari menjadi beberapa hari dalam penyelesaiannya dan mengakibatkan pekerjaannya kurang optimal.

Kata Kunci : Pengembangan Kapasitas, Aparatur Desa, Administrasi Kependudukan

**OPTIMIZATION OF POPULATION ADMINISTRATION SERVICES
THROUGH CAPACITY DEVELOPMENT OF VILLAGE APPARATUS
(CASE STUDY IN SENAYAN VILLAGE, POTO TANO DISTRICT, WEST
SUMBAWA REGENCY)**

Rahmatullah¹, M. Ulfatul Akbar Jafar², H. Abdurrahman³
Student¹, Supervisor², Principal Advisor³
Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences
Muhammadiyah University of Mataram

ABSTRACT

The goal of this research is to find out how to improve the capacity of village apparatus in order to improve the implementation of population administration services (Case Study in Senayan Village, Poto Tano District, West Sumbawa Regency). The research method employed was a qualitative research method with a descriptive approach, using observation, interviews, and documentation as data gathering methods. The Senayan Village Head, Senayan Village Secretary, Senayan Village Staff, Head of BPD, and Senayan Village Community were the study's informants.

The study's findings show that the Capacity Development of Village Apparatuses in Optimizing the Implementation of Population Administration Services in the variables of Skills, Capabilities, and Work Groupings of Village Apparatuses is quite good and in accordance with applicable SOPs, though it is still not optimal, particularly in the skills of making and replacing the requirement boards for making KTP, KK, as well as the data board of the residents of the Senayan village community, and the absence of a village map or other slogan, and the absence of the presence of the village apparatus was not implemented. It makes it easy for everyone in the village apparatus to make mistakes by arriving late and returning home outside of working hours. In this case, it is also explained that the ethical variables are not good and are unable to provide population administration services to people in need, especially the absence of absences that control them to come and go home on time, and in providing services they are not so friendly, so that in the skills of the Senayan village apparatus in carrying out their duties when there are people who will make a kind of correspondence, making KTP, KK are not made immediately but are made when there are people who will make a kind of correspondence.

Keywords: *Capacity Building, Village Apparatus, Population Administration*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINILITAS	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1. Penelitian Terdahulu	13
2.2. Landasan Teori	16
2.2.1 Manajemen	16
2.2.2 Pengembangan Kapasitas	18
2.2.3 Aparatur desa	27
2.2.4 Pelayanan Kependudukan	31
2.3. Kerangka Berfikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	38

3.3	Metode Penentuan Narasumber	38
3.4	Jenis dan Sumber Data	39
3.4.1	Jenis Data.....	39
3.4.2	Sumber Data	40
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.6	Teknik Analisis Data.....	42
3.7	Uji Validitasi Data.....	44
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1	Deskripsi Tempat Penelitian.....	46
4.1.1	Batas Wilayah	46
4.1.2	Luas Wilayah	46
4.1.3	Jumlah Penduduk	46
4.1.4	Struktur Organisasi Pemerintah Desa	47
4.1.5	Visi dan Misi dari Desa Senayan	48
4.2	Hasil dan Pembahasan	49
4.2.1	Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan.....	49
4.2.1.1	Keterampilan	51
4.2.1.2	Kemampuan	55
4.2.1.3	Pengelompokan Kerja	59
4.2.1.4	Etika	62
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	66
5.1	Kesimpulan	66
5.2	Saran	67
	DAFTAR PUSTAKA	69
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	72

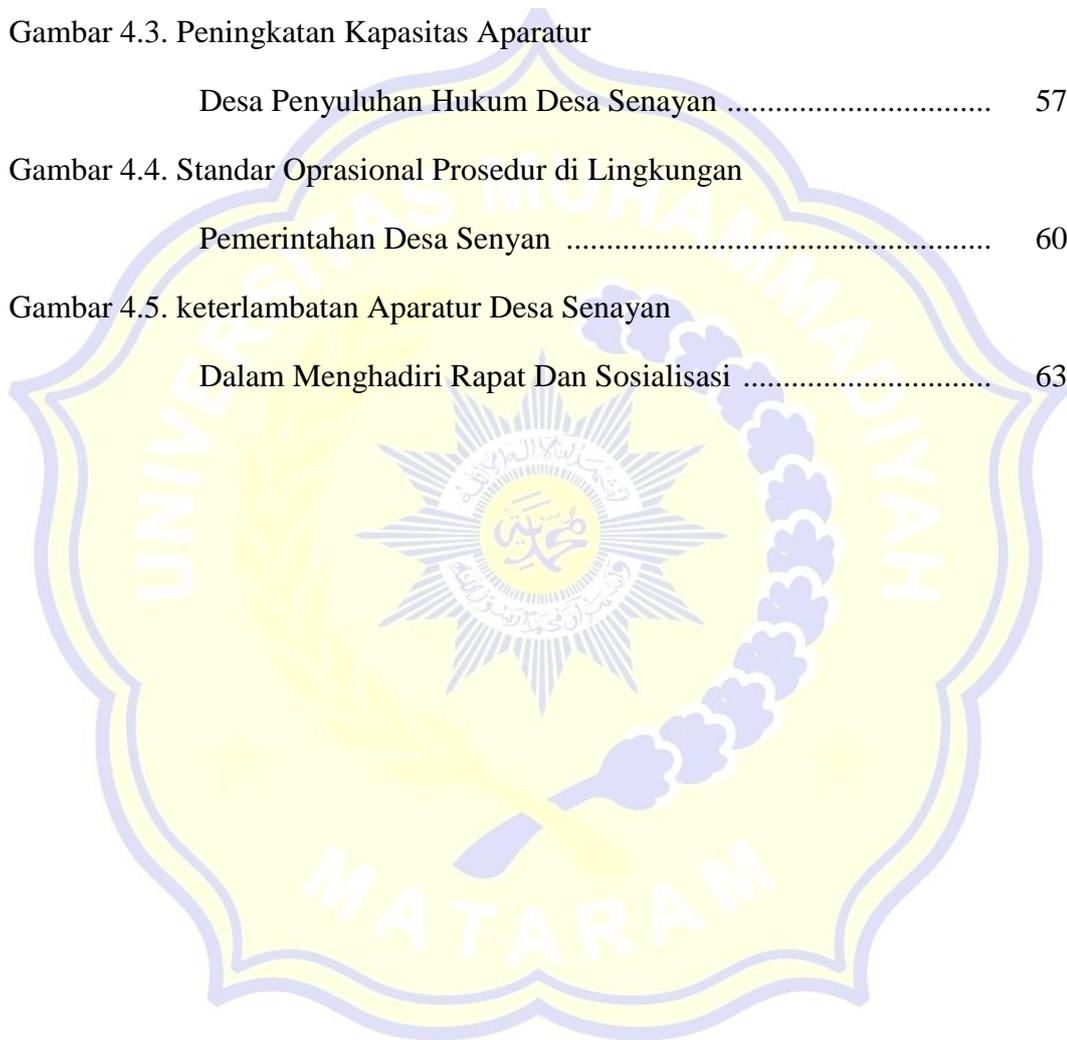
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Daftar Aparatur Desa Senayan	6
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	15
Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Antara Laki-Laki dan Dan Perempuan	47
Tabel 4.2. Daftar Pendidikan Aparatur Desa Senayan	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3. kerangka Berfikir	37
Gambar 3.6 Langkah-Langkah Analisis	43
Gambar 4.1. Struktur pemerintahan Desa Senayan	47
Gambar 4.2. Pemberian Pelayanan Administrasi Kependudukan	53
Gambar 4.3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Penyuluhan Hukum Desa Senayan	57
Gambar 4.4. Standar Oprasional Prosedur di Lingkungan Pemerintahan Desa Senayan	60
Gambar 4.5. keterlambatan Aparatur Desa Senayan Dalam Menghadiri Rapat Dan Sosialisasi	63



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan model pelaksanaan desentralisasi. Pasal 18 UUD 1945 misalnya, antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah-daerah Indonesia menjadi daerah-daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunannya masing-masing ditetapkan dengan undang-undang dengan memperhatikan asas-asas pokok permusyawaratan dalam pemerintahan negara. sistem hak asal usul di daerah khusus.

Indonesia terbagi menjadi 34 provinsi, salah satunya adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Indonesia mengelola sendiri untuk mengelola sumber daya alam dan manusia yang ada dalam rangka meningkatkan kemandirian, serta meningkatkan potensi dan kemajuan daerah. Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu kota atau daerah yang telah diberikan otonomi daerah, dan juga menjadi lokasi peneliti untuk melakukan penelitian lapangan di salah satu desa terkait dengan permasalahan yang muncul di sana.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 6 dan 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, “Otonomi daerah adalah hak,

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. sesuai dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada Pemerintah Pusat sebagai instansi vertikal di daerah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota yang membidangi semua urusan pemerintahan.

Pemerintah desa juga merupakan subsistem dari sistem pemerintahan, artinya desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri, selain sebagai subsistem dari sistem pemerintahan itu sendiri. Desa dipahami sebagai suatu kesatuan wilayah hukum dimana suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki kewenangan) mempunyai pemerintahan sendiri dan diperintah oleh masyarakat tersebut.

Desa didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang pemerintahan daerah, dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang pemerintahan desa. Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul hak dan atau hak tradisional yang diakui. Desa juga merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui.

Pelayanan administrasi kependudukan yang baik bagi suatu masyarakat harus diberikan oleh pemerintah karena merupakan unit penyelenggara pemerintahan yang berada di garis depan, berhadapan langsung dengan masyarakat dari berbagai latar belakang dan kebutuhan yang selalu berubah dan berkembang. Sesuai dengan prinsip pelayanan publik, aparat desa diharapkan mampu melaksanakan tanggung jawab pelayanannya kepada masyarakat desa secara efisien dan efektif. Akibatnya, pelayanan publik terkait erat dengan kepentingan publik, dengan penyedia layanan berkewajiban untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka dan membantu mereka mencapai tujuannya.

Selanjutnya, desa memiliki kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri, termasuk urusan sosial, politik, dan ekonomi, untuk kepentingan seluruh masyarakat, tanpa perlu campur tangan dari luar. Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pimpinan Daerah, dan Pelaksana Teknis yang kesemuanya berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa. Perangkat desa merupakan salah satu otoritas kepala desa tertua di negara ini.

Menurut Pasal 10 ayat 1 dan 2 PERDA Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu; 1). Dalam melaksanakan kegiatan, aparat desa harus menentukan apakah mereka netral dan tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap warga, suku, kelompok agama, atau kelompok masyarakat. 2). 2) Selama proses pemilihan kepala desa, perangkat desa tidak boleh memihak atau menentang calon kepala desa tertentu.

Dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Perangkat Desa dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut: a. bertindak untuk kepentingan umum; B. mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau kelompok tertentu; C. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; D. diskriminasi terhadap warga negara dan/atau kelompok masyarakat tertentu; e. melakukan tindakan yang mengganggu sekelompok masyarakat Desa; F. melakukan persekongkolan G. menjadi pengurus partai politik; H. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; I. merangkap sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota antara lain jabatan. G. menjadi pengurus partai politik;

Desa Senayan merupakan salah satu desa di Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, dan terdiri dari beberapa dusun. Terletak di Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. Seluruh masyarakat yang tinggal di perbatasan desa Senayan memahami bahwa pelaksanaan pemerintahan desa yang baik sangat penting. Sasaran yang diharapkan tahun ini adalah mewujudkan kinerja pemerintah, khususnya dalam memberikan pelayanan dan memajukan kesejahteraan umum penduduk.

Dalam Undang-Undang Pelayanan Publik (No. 25 Tahun 2009) disebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap warga negara dan penduduk dalam penyelenggaraan pelayanan publik. barang, jasa, dan jasa administrasi oleh penyedia jasa. publik.

Subarsono (2008) mendefinisikan pelayanan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat umum dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan dengan tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengguna yang dimaksud adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan seperti pembuatan akta kelahiran, pembuatan KTP, pembuatan akta nikah, pembuatan akta kematian, pembuatan akta, dan pelayanan lainnya yang termasuk dalam pelayanan masyarakat.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Bupati yang mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. koordinasi Administrasi Kependudukan;
- B. pembentukan Kantor yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- C.pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan;

Adapun data tentang aparatur Desa Senayan yang penulis dapatkan dari kantor Desa Senayan:

Tabel : 1

**Daftar Aparatur Desa Senayan.
Tahun : 2021**

No.	Nama	Pendidikan	Jabatan
1	Faizal	SLTA	Sekdes
2	Mahsun, S.Pd	S1	Kasi Pemerintahan
3	Burhanuddin	SLTA	Kasi Kesra
4	Syafruddi, S.AP	S1	Kasi Pelayanan
5	Syamsul Hidayat	SLTA	Kaur Perencanaan
6	Sumiati, S.Pd.Sd	SLTA	Kaur Keuangan
8	Asmawati, S.Pd	S1	Kaur TU & Umum
9	Tomi Perdana Putra	SLTA	Kadus Senayan Bawah
10	M. Jafar	SLTA	Kadus Senayan Atas
11	Ahipuddin	SLTA	Kadus Jembatan Kemar

Sumber : Monografi Desa Senayan.

Namun pada kenyataannya yang terlihat pada saat peneliti melakukan penelitian awal dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat masih kurang optimal, dilihat dari etika dan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang masih kurang memadai, contohnya pada saat masyarakat ingin membuat persyaratan pembuatan KTP (kartu Tanda Penduduk) atau surat domisili, aparatur atau staf desa masih kurang mengetahui tugas fungsi masing-masing. Adapun contoh lainnya yaitu pemberian pelayanan yang baik tidak merata untuk seluruh masyarakat yang menimbulkan kecemburuan sosial.

Dan yang paling banyak terjadi adalah aparat desa dalam menghadiri rapat atau masuk kantor tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, datang melebihi jam kantor dan pada saat jam pulangpun mereka mendahului jam yang disepakati. Hal ini tentu menjadi permasalahan yang berat, karna berdampak pada masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan yang cepat dan tentunya masyarakat harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan pelayanan. Oknum-oknum yang terlibat masih merasa tidak bersalah atas apa yang mereka lakukan, ini artinya mereka tidak ada rasa bertanggung jawab atas pekerjaannya.

Sumber Daya Manusia adalah salah satu faktor terpenting dalam organisasi atau perusahaan, di samping faktor lain seperti aktivitas dan modal. Sebagai salah satu fungsi dalam suatu organisasi yang disebut dengan manajemen, maka sumber daya manusia perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi. Sumber Daya Manusia adalah istilah yang digunakan untuk menyebut orang-orang yang bekerja di bidang sumber daya manusia.

Individu dikembangkan agar dapat diintegrasikan ke dalam berbagai organisasi efektif yang dibutuhkan oleh masyarakat. Manajemen Sumber Daya Manusia adalah pengembangan orang sehingga mereka dapat diintegrasikan ke dalam berbagai organisasi efektif yang dibutuhkan oleh masyarakat. Manusia perlu dianggap sebagai aset (aset) terpenting organisasi, dan dalam hal ini harus dikelola dengan baik dan dimanfaatkan secara produktif. 2012:2) (Basir Barthos, 2012:2) (Basir Barthos, 2012:2) (Basir Barthos, 2012:2) Berkas diunduh dari <https://Frepository.uinsu.ac.id> pada 19 November 2021.

Berbagai sumber daya digunakan sebagai input oleh organisasi untuk menghasilkan berbagai output dalam bentuk barang atau jasa. Mereka termasuk modal atau uang, teknologi untuk mendukung proses manufaktur, metode atau strategi untuk melakukan operasi bisnis, serta orang-orang, antara lain. Modal manusia, juga dikenal sebagai sumber daya manusia (SDM), adalah jenis sumber daya yang paling penting di antara berbagai jenis sumber daya. Alat manajerial yang dikenal sebagai manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk merencanakan, mengelola, dan mengendalikan sumber daya manusia (SDM).

Bapak Munawir menyatakan bahwa observasi awal yang dilakukan sebagai hasil wawancara dengan Bapak Munawir mengenai permasalahan yang dihadapi Aparatur Desa dalam memberikan pelayanan kependudukan kepada masyarakat Desa Senayan, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat:

Tugas pelayanan kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan karena masih ada masyarakat yang membicarakan berapa lama, misalnya dalam menyelesaikan penyerahan KTP, aparat desa menyelesaikan surat pengantar KTP dalam satu hari tetapi harus menumpuk terlebih dahulu atau menunggu beberapa surat pengantar lainnya sebelum mereka dapat melanjutkan pengiriman. Adanya tumpukan KTP yang banyak membuat prosesnya memakan waktu lebih dari satu minggu dan membuat masyarakat dalam ketidakpastian, persis seperti yang terjadi pada saat pembuatan kartu KK. Aparat terus mengambil keputusan dalam pelayanan kepada masyarakat. Namun masih ada sebagian masyarakat yang mendapat perlakuan khusus, artinya aparatur belum menetapkan statusnya sebagai pegawai negeri sesuai dengan fungsinya.

Beberapa petugas menunjukkan sikap pilih kasih terhadap masyarakat, seperti memberikan pelayanan kepada keluarga yang anggotanya akrab dengan aparat desa bahkan mereka yang memiliki sumber keuangan lebih. Keadilan tidak hanya ditemukan dalam hukum; keadilan juga ditemukan dalam hak asasi manusia, memungkinkan setiap orang untuk diperlakukan sama. (Wawancara akan dilakukan pada hari Senin, 25 Oktober 2021 pukul 16.00 WITA di kediaman Pak Munawir)

Dari hasil obsevasi awal peneliti secara langsung dan tidak langsung melalui media masa/ media online, bahwasanya di Desa Senayan masih terdapat masalah yang berkaitan dengan pelayanan kependudukan, yang dimana masyarakat Desa Senayan masih banyak yang tidak tahu-menahu apa saja yang harus di persiapkan ketika ingin mengakses pelayanan Kependudukan, aparatur Desa tidak membuatkan suatu bagan pemberitahuan apa saja yang akan menjadi pesyaratan ketika ingin mengakses biodata, yang mana seharusnya dalam pelayanan kependudukan itu harus memberitahukan atau membuat suatu bagan di kantor desa Senayan tentang persyaratan akses mudah dan cepat dalam mengakses berbagai layanan kependudukan, agar masyarakat paham dalam mengakses berbagai pelayanan kependudukan untuk pembuatan Biodata kependudukan seperti, formulir Kartu Keluarga (KK) formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Hilang Kartu Keluarga, surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Kelahiran, sehingga masyarakat Desa Senayan paham dengan persyaratan layanan Kependudukan.

Ditambah lagi minimnya Sosialisai dari pemerintah Desa terkait pelayanan Kependudukan serta berdasarkan pengamatan awal yang telah dilakukan di kantor Desa Senayan Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat bahwa masih terdapat masalah, yang mana masalahnya dari pertama kali untuk melekukan pelayanan masyarakat yang datang saja disambut dengan suasana yang tidak ramah, serta sarana dan prasarana yang belum memadai seperti komputer dan printer yang

rusak mengakibatkan terlambatnya pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat, komputer hanya satu itupun ada didalam ruangan sekretaris Desa, dan pendingin ruangan yang belum memadai pada tempat pelayanan.

Tidak disiplinnya Aparatur Desa dalam melakukan Pelayanan, dimana aparaturnya Desa yang lambat datang untuk melakukan pelayanan, sehingga masyarakat mengeluh dengan pelayanan yang diberikan, Dengan apa yang terlihat langsung oleh peneliti sesuai dengan paparan diatas tentu ini harus menjadi topik utama yang harus mendapatkan solusi untuk menyelesaikan masalah, baik dari masukan masyarakat, masukan peneliti maupun kewenangan kepala desa. Jika masalah yang terjadi terus dilakukan tanpa adanya solusi ini tentu akan mengakibatkan konflik besar dan menghambat perkembangan desa Senayan sendiri.

Maka dari sinilah peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian di Desa Senayan dengan mengacu pada pemaparan permasalahan inti dari apa yang terjadi di Desa Senayan ini tentu akan banyak menimbulkan keresahan masyarakat melihat kinerja dari aparaturnya desa tidak dilakukan sesuai tupoksi yang ditetapkan. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut maka penulis mengangkat judul yaitu *Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Pada Desa Senayan Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat)*.

2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

⇒ Bagaimana Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Pada Desa Senayan Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat)?

3.1 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Pada Desa Senayan Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat).

4.1 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu pemerintahan mengenai Pengembangan Kapsitas Aparatur Desa dalam Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan.

1.4.2 Manfaat praktis

Diharapkan mampu memberi sumbangan pemikiran, masukan-masukan bagi aparatur desa sebagai gambaran umum dan kontribusi dalam optimalisasi penyelenggaraan pelayanan terutama pada tahap administrasi kependudukan.

Dan bagi masyarakat sebagai tambahan informasi dan pengetahuan mengenai pengembangan kapasitas aparatur desa dalam optimalisasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan masyarakat Desa Senayan Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.

1.4.3 Manfaat Akademis

Salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Program Studi Administrasi Publik dengan gelar S.AP dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram adalah menyelesaikan Program Studi Administrasi Publik dengan gelar S .AP derajat.

BAB II

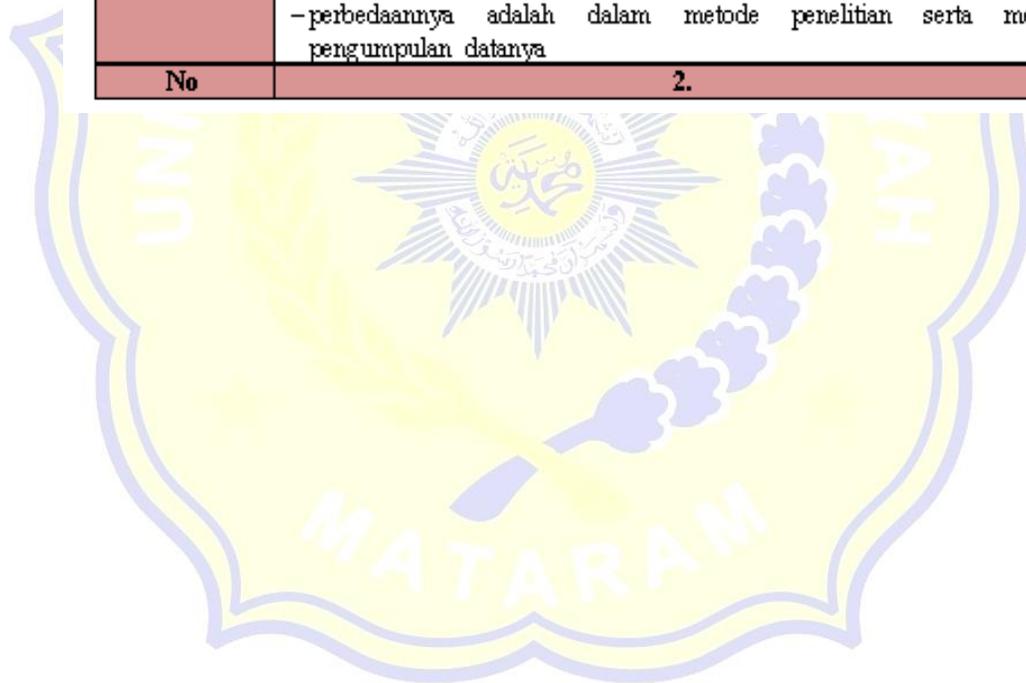
KAJIAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Saat melakukan penelitian ini, peneliti menggabungkan penelitian sebelumnya dengan tema yang sama untuk meningkatkan kualitas penelitian ini secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan peneliti memahami bahwa dalam melakukan penelitian apapun, literature review berperan penting dalam menentukan tujuan dan alat penelitian dengan memilih konsep yang sesuai. Karena tinjauan pustaka digunakan sebagai kerangka untuk melakukan analisis pada objek yang diteliti, maka dapat dianggap sebagai fungsi hubungan yang akan digunakan untuk menjelaskan gejala dan masalah yang akan diteliti. Bagian ini berisi informasi tentang apa yang akan dipelajari dalam penelitian ini secara sistematis, sedangkan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	1.
Peneliti/ Judul	Dheasey Amboningtyas dan Yulianeu, “ Pengembangan Capacity Building Dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pada Usaha Kecil Menengah Di Kecamatan Tugu Semarang”. Tahun 2019
Metode	Kuantitatif
Hasil	Banyak cara untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia, antara lain dengan peningkatan pendidikan, skill (keterampilan), dan kemampuan. Pengembangan sumber daya manusia menjadikan UKM lebih kuat dalam persaingan dunia usaha lokal maupun global. Pengembangan kapasitas membutuhkan sumber daya yang unggul, yang dapat dilakukan melalui program pembinaan, pelatihan dan bimbingan. Setiap UKM tentu memiliki kebutuhan dan keunikan tersendiri, sehingga program capacity building pun hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing UKM.
Persamaan/ Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> -persamaanya adalah sama-sama menjabarkan tentang pengembangan kapasitas dalam meningkatkan sumber daya manusia -perbedaannya adalah dalam metode penelitian serta metode pengumpulan datanya
No	2.



Peneliti/ Judul	Imam Madiyono (dkk), "Kapasitas Perangkat Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa". Tahun 2016
Metode	Kualitatif Deskriptif
Hasil	Kesimpulan pada akhir penelitian ini adalah Kapasitas Perangkat Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang dalam Mengelola Alokasi Dana Desa secara keseluruhan telah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini dapat dilihat dari kesimpulan masing-masing dimensi sebagai berikut: 1. Dimensi pada tingkatan individu; 2. Dimensi pada tingkatan organisasi; 3. Dimensi pada tingkatan system; 4. Realisasi dari keseluruhan program dan kegiatan yang dirancang Perangkat Desa Teluk Bakau telah terlaksana secara maksimal.
Persamaan/ Perbedaan	-persamaannya adalah sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan membahas mengenai kapasitas aparatur desa -perbedaannya adalah objek dari pelaksanaan aparatur desanya.
No	3.
Peneliti/ Judul	Haviz Lasmana, "Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Aparatur Desa (Studi Terhadap Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga)". Tahun 2017
Metode	Kualitatif Deskriptif
Hasil	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tingkat pemahaman, Aparatur Desa Panggak Laut sudah memahami mengenai penyusunan perencanaan pembangunan desa. Pada indikator keterampilan, Aparatur Desa Panggak Laut sudah menjalankan tugas dan fungsinya secara terampil. Pada indikator kemampuan, Aparatur Desa Panggak Laut sudah mampu menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan harapan masyarakat dan mampu mengelola dana desa sesuai dengan ketentuan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kapasitas Aparatur Desa Panggak Laut dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Aparatur Desa Panggak Laut sudah dibekali dengan pelatihan dan pendidikan yang menunjang terjadinya peningkatan kapasitas.
Persamaan/ Perbedaan	-persamaannya adalah persamaannya adalah sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif -perbedaannya adalah yang menjadi permasalahan ini untuk dibahas dalam pembahasan
No	4.
Peneliti/ Judul	Rima Adhi Hapsari dan Sudaryanti, "Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi Di Desa Ngimbrang Kecamatan Buli Kabupaten Tembung)". Tahun 2020
Metode	Kualitatif Deskriptif
Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas SDM aparatur Pemerintah Desa Ngimbrang dilakukan melalui 2 jenis kegiatan, yaitu Pembimbingan Teknis (Bimtek) serta kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Tahapan tersebut sejauh ini sudah dilaksanakan dengan baik karena sudah berpedoman pada regulasi

	yang ada dan selalu berkoordinasi dengan organisasi pemerintah daerah yang ada di atas pemerintah desa.
Persamaan/ Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> - persamaannya adalah sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan sama-sama membahas mengenai kapasitas aparatur desa dalam memberikan pelayanan. - Perbedaannya adalah tempat serta waktu penelitiannya.
No	5.
Peneliti/ Judul	Rezki Nurul Annisa A. " Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Garam Di Kabupaten Jeneponto". Tahun 2017
Metode	Deskriptif Kualitatif
Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengembangan sumber daya manusia dalam pemberdayaan masyarakat petani garam dilakukan dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Jeneponto, sudah efektif dan efisien baik dimensi pelatihan kader, kondisi kerja maupun rekrutmen sudah baik, kecuali pemberian sistem insentif tidak jelas (2) penguatan organisasi dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Jeneponto sudah efektif baik dari dimensi pemanfaatan pegawai, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi, dan struktur manajer kecuali pada sistem pemberian insentif yang mendukung tidak ada yang diberikan (3) belum ada pembaharuan institusi dalam pemberdayaan masyarakat petani garam karena tidak ada aturan main penguasa politik, tidak ada perubahan ataupun hukum terkhusus dalam pemberdayaan masyarakat petani garam.
Persamaan/ Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> - persamaannya adalah persamaannya adalah persamaannya adalah sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif - perbedaannya adalah yang menjadi objek penelitian dengan permasalahan yang berbeda.

Sumber : Skripsi Tahun 2016-2020

Dengan adanya penelitian terdahulu di atas menjawab bahwa penelitian ini bukanlah penelitian yang bersifat baru, hanya saja peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang pelayanan kependudukan yang dilakukan oleh aparatur desa terhadap masyarakat. Penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan jelas berbeda dengan yang akan peneliti lakukan dari tempat, metode serta indikator dan subjeknya.

2.2 Landasan Teori

2.2.1. Menejemen

1. Pengertian Menejemen

Pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, menurut Malayu Hasibuan (2011: 9), adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien guna mencapai suatu tujuan tertentu.

Lebih penting lagi, menurut Light dalam Syamsuddin (2006), manajemen adalah kerangka pengetahuan tentang kepemimpinan yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian sumber daya seperti sumber daya dan uang untuk mencapai tujuan dengan cara yang paling efisien.

2. Menejemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia organisasi atau perusahaan merupakan salah satu faktor terpenting dalam organisasi atau perusahaan, disamping faktor-faktor lain seperti kegiatan dan modal. Sebagai salah satu fungsi dalam organisasi yang disebut dengan manajemen, maka sumber daya manusia perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan

efisiensinya. Sumber Daya Manusia adalah istilah yang digunakan untuk menyebut orang-orang yang bekerja di bidang sumber daya manusia.

Perencanaan sumber daya manusia adalah hubungan penting antara perencanaan strategis dan manajemen sumber daya manusia, dan itu tidak boleh diabaikan. Rencana yang menjadi landasan untuk setiap jenis kegiatan organisasi dikenal sebagai rencana strategis. Perencanaan adalah proses menentukan tujuan apa yang harus dikejar selama periode waktu di masa depan dan tindakan apa yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam perencanaan sumber daya manusia, informasi dikumpulkan dan digunakan untuk mendukung keputusan tentang di mana mengalokasikan sumber daya. Sumber daya manusia adalah program pelatihan utama bagi tim manajemen perusahaan dalam menjalankan bisnis. Ini adalah desain sistem formal dalam suatu organisasi untuk menentukan efektivitas dan efisiensi dengan tujuan organisasi yang dicapai yang disebut sebagai Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Apa yang merupakan sumber daya manusia tidak harus ditentukan oleh apa yang mereka lakukan, melainkan oleh apa yang mereka hasilkan (atau hasilkan).

(2006:22) berpendapat bahwa manajemen sumber daya manusia terdiri dari kebijakan terpadu mengenai hubungan kerja yang berdampak pada orang-orang dalam organisasi, dan inilah yang dimaksud

Syamsuddin. Manajemen sumber daya manusia adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan agar sumber daya manusia organisasi dapat digunakan secara efektif dan efisien guna mencapai berbagai tujuan. Penekanannya adalah pada kenyataan bahwa para manajer di semua tingkat organisasi harus memperhatikan dengan seksama pentingnya manajemen sumber daya manusia.

Menurut Basir Barthos (2012:2), tugas manajemen sumber daya manusia adalah memfasilitasi pengembangan individu sehingga mereka dapat secara efektif diintegrasikan ke dalam berbagai organisasi yang dibutuhkan oleh masyarakat tertentu. Manusia perlu dianggap sebagai aset (aset) terpenting organisasi, dan dalam hal ini harus dikelola dengan baik dan dimanfaatkan secara produktif.

Berbagai sumber daya digunakan sebagai input oleh organisasi untuk menghasilkan berbagai output dalam bentuk barang atau jasa. Mereka termasuk modal atau uang, teknologi untuk mendukung proses manufaktur, metode atau strategi untuk melakukan operasi bisnis, serta orang-orang, antara lain. Modal manusia, juga dikenal sebagai sumber daya manusia (SDM), adalah jenis sumber daya yang paling penting di antara berbagai jenis sumber daya. Alat manajerial yang dikenal sebagai manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk merencanakan, mengelola, dan mengendalikan sumber daya manusia (SDM).

2.2.2. Pengembangan Kapasitas

a. Pengertian Pengembangan Kapasitas

Menurut Morgan dan Soeprapto (2010:10), pengembangan kapasitas adalah pengembangan kemampuan, keterampilan, pemahaman dan sikap individu, organisasi, jaringan atau sektor, dan sistem, serta pengembangan nilai-nilai, perilaku, motivasi, sumber daya dan kondisi yang mendukung setiap individu, organisasi, jaringan, atau sektor, dan sistem. lebih banyak orang untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu.

Pandangan yang dikemukakan di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Yap dalam Gandara (2008:9), yang menyatakan bahwa capacity building adalah suatu proses yang meningkatkan individu, kelompok, organisasi, komunitas, dan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Grindel dan Keban (2008) mendefinisikan capacity building sebagai rencana yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya tanggap pemerintah dengan tetap memperhatikan pengembangan dimensi, sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan atau lingkungan.

b. Tujuan Pengembangan Kapasitas

Peningkatan efisiensi, daya tanggap dan kinerja dapat dicapai melalui peningkatan kapasitas. Dimulai dengan kebutuhan untuk mengalami hal-hal dan mengurangi ketidakpastian dan ketidakpastian

dalam hidup dan mengembangkan keterampilan untuk menghadapi perubahan adalah langkah pertama dalam pengembangan kapasitas.

pendapat Menurut para ahli yang disebutkan di atas, berikut adalah tujuan utama dari peningkatan kapasitas:

1. Biasanya terdapat pada implementasi sistem.
2. Khusus untuk meningkatkan kinerja yang dapat dilihat dari beberapa perspektif yang berbeda;
 - a) Dalam hal waktu dan tenaga (sumber daya) yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, efisiensi adalah kuncinya.
 - b) Efficacy berupa kesesuaian yang dilakukan untuk hasil yang diinginkan.
 - c) Responsiveness, yaitu kemampuan untuk mencocokkan persyaratan dengan kemampuan sendiri untuk mencapai tujuan tertentu.
 - d) Individu, kelompok, organisasi, dan sistem semuanya mendapat manfaat dari jenis pembelajaran ini.

c. Karakteristik Pengembangan Kapasitas

Seperti inilah pengembangan kapasitas menurut Gandara (2008a):

1. Ini adalah prosedur yang berkelanjutan.
2. Adalah proses internal yang memiliki esensi

3. Menganggap nilai tersendiri karena didasarkan pada potensi yang ada
4. Menangani masalah perubahan
5. Menggunakan pendekatan holistik dan terintegrasi.

Metrik ini menunjukkan bahwa membangun kapasitas adalah proses yang berkelanjutan, bukan hanya hasil dari satu peristiwa.

Akibatnya, pengembangan kapasitas bukanlah proses yang dimulai dari awal, melainkan proses yang dibangun di atas potensi yang ada dari individu, kelompok, atau sistem untuk berkembang dalam lingkungan yang terus berubah.

Meskipun pengembangan kapasitas dikonseptualisasikan sebagai sebuah proses, implementasi aktualnya dapat diukur dalam hal ketinggian yang diinginkan, baik jangka pendek atau menengah.

d. Dimensi dan Tingkat Pengembangan Kapasitas

Banyak kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi pengembangan kapasitas, tetapi sulit untuk menentukan dengan tepat fokus yang berdampak pada kapasitas. Akibatnya, perspektif yang berbeda sedang dibentuk berdasarkan pekerjaan sebelumnya dan keahlian dari berbagai ahli.

Menurut Keban (2008:202), peningkatan kapasitas oleh Bank Dunia meliputi:

1. Pengembangan sumber daya manusia.

2. keseluruhan struktur dan gaya manajemen perusahaan, termasuk aturan, struktur, prosedur, dan sumber dayanya.
3. Koordinasi kegiatan organisasi, fungsi jaringan, dan interaksi formal dan informal merupakan bagian dari jaringan interaksi organisasi.
4. Ini termasuk aturan dan regulasi yang mengatur layanan publik, tanggung jawab dan wewenang antar lembaga, kebijakan yang bertanggung jawab atas tugas pembangunan, dan dukungan keuangan untuk organisasi.
5. Berbagai macam faktor yang mempengaruhi kinerja, termasuk faktor politik, ekonomi, dan sosial.

Mengutip Sofyan Arif (2011:5.34), “diharapkan manajer dapat memperkirakan atau memprediksi tindakan individu yang akan terjadi dalam berbagai situasi sebelum mereka dapat menyesuaikan kebijakannya dalam mengelola organisasi dengan memahami pola perilaku individu dan motivasinya.

Sebagai hasil dari penerapan keempat aspek tersebut secara efektif, pengembangan kapasitas ini akan menghasilkan tenaga profesional yang cakap dalam kapasitas teknis berdasarkan empat tingkatan pelaksanaan, yaitu:

1. Tingkat Individu

Berbicara tentang pengembangan kapasitas di tingkat individu, kita mengacu pada tingkat pengembangan yang dilakukan oleh setiap individu Aparatur Desa melalui kemampuan dan pengelompokan kerja.

- a) Peningkatan kapasitas aparatur Desa Senayan dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, pengajaran, dan kesempatan belajar yang luas baik formal maupun informal, seperti kursus, pelatihan, magang, sosialisasi, dan kegiatan lainnya.
- b) Pada kategori kedua terdapat kapabilitas yang merupakan potensi dari aparatur Desa Senayan yang kemudian diterapkan pada tugas yang diberikan kepada mereka sebagai pengelola sistem informasi desa.
- c) c) Pembagian kerja, yaitu pembagian kerja yang diberikan kepada perangkat Desa Senayan sesuai dengan tingkat keahliannya.
- d) Suatu norma atau aturan yang dijadikan pedoman dalam berperilaku dalam masyarakat dalam kaitannya dengan sifat baik dan buruk, dan bagaimana perangkat Desa Senayan menghormati orang yang lebih tua, jujur, dan tidak datang terlambat untuk bekerja diwakili oleh huruf E

2. Tingkat Organisasi

Tingkat organisasi mengacu pada tingkat pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh organisasi Pemerintah Desa Senayan, yang meliputi pengembangan aturan organisasi, sistem kepemimpinan, pengembangan sumber daya, dan penyediaan sarana dan prasarana kerja. Tingkat organisasi terdiri dari pengembangan aturan organisasi, sistem kepemimpinan, pengembangan sumber daya, dan penyediaan sarana dan prasarana kerja.

- a. Pengambilan Keputusan, yaitu proses penetapan suatu kebijakan atau program Pemerintah Desa Senayan yang dilakukan melalui musyawarah.
- b. Resources, yaitu nilai moneter Pemerintah Desa Senayan berupa anggaran yang dialokasikan untuk mendukung peningkatan kinerja aparatur pemerintah secara keseluruhan.
- c. Sarana dan Prasarana Kerja, meliputi penyediaan sarana penunjang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan tugas.

3. Tingkat Sistem

Derajat pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh sistem implementasi disebut sebagai Level Sistem. Kerangka dan kebijakan Pemerintah Desa Senayan dituangkan dalam dokumen tersebut.

- a. Kerangka kerja, yang menjadi acuan mendasar atau Standard Operating Procedure (SOP) yang digunakan sebagai pedoman kerja bagi pemerintah desa Pagerharjo dalam penyelenggaraan sistem informasi desa.
- b) Kebijakan, yaitu inisiatif yang dikembangkan oleh Pemerintah Desa Senayan dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara sistem informasi desa, dengan tujuan memperkuat dan memberdayakan masyarakat.

e. Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Kapasitas

Beberapa variabel mempengaruhi efektivitas proyek pengembangan kapasitas dalam pemerintahan desa. Berikut adalah beberapa contoh. Namun demikian, menurut Djumandi (2006): 154-156, ada beberapa elemen yang mempengaruhi pengembangan kapasitas, antara lain sebagai berikut:

- 1) Sejauh mana pengembangan kapasitas akan dilaksanakan atau berhasil akan ditentukan oleh tingkat komitmen bersama yang ditunjukkan oleh semua pemain yang berpartisipasi dalam suatu organisasi (termasuk pemerintah desa). Komitmen bersama ini adalah modal dasar yang harus dibangun secara konsisten dan dijaga agar berfungsi dengan baik karena variabel-variabel ini akan menjadi landasan bagi semua upaya desain yang akan dilakukan oleh sebuah bisnis. Kami berharap program

peningkatan kapasitas ini dapat terus berjalan dengan lancar meskipun tanpa adanya komitmen dari pimpinan dan pekerja tingkat tinggi, menengah, dan bawah.

- 2) Kemampuan mengambil inisiatif (Leadership). Kepemimpinan adalah salah satu faktor terpenting yang memengaruhi awal dan efektivitas proyek pengembangan kapasitas, namun juga yang paling sulit untuk dipengaruhi. Mekanisme kepemimpinan yang dinamis harus digunakan untuk menggerakkan organisasi publik dengan cara yang sama seperti yang dilakukan di sektor swasta agar berhasil. Karena semakin sulitnya masalah ke depan dan kenyataan keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk sektor publik, serta fakta bahwa gaya kepemimpinan adalah salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi keberhasilan organisasi secara keseluruhan, inilah masalahnya.
- 3) Perubahan peraturan. Ada dua rintangan utama dalam inisiatif pengembangan kapasitas di Indonesia: lingkungan politik dan otoritas lokal yang selalu mengandalkan norma-norma terkini dan masalah hukum prosedural. Kemampuan program ini dapat ditingkatkan melalui reformasi, yang merupakan aspek penting dari pelaksanaannya, yang sangat dipengaruhi oleh pertimbangan kepemimpinan.

4) Perlunya perubahan kelembagaan. Transformasi kelembagaan tentunya harus mencakup reformasi regulasi di atas. Program pengembangan kapasitas individu dan organisasi hanya dapat dilaksanakan secara efektif jika iklim budaya mendukung pelaksanaannya. Transformasi kelembagaan bertujuan untuk menciptakan lingkungan ini. Ada dua komponen utama reformasi kelembagaan: struktural dan kultural. Kedua elemen ini harus ditangani dengan baik untuk membantu memperkuat proyek pengembangan kapasitas pemerintah desa di Indonesia.

5) Kesadaran diri dan perbaikan diri. Untuk meningkatkan kapasitas, harus ada pengakuan baik dari masyarakat maupun institusi atas kondisi sumber daya yang tersedia saat ini. Untuk memperkuat program peningkatan kapasitas, kejujuran tentang keterampilan seseorang adalah salah satu kebutuhan. Pengakuan ini sangat penting.

Pertumbuhan kapasitas dipengaruhi oleh komitmen bersama, kepemimpinan, perubahan regulasi dan kelembagaan, dan pemahaman yang jelas tentang kelebihan dan kekurangan Pemerintah Desa Senayan seperti yang ditunjukkan oleh sistem informasi desa, sebagaimana diuraikan di atas.

2.2.3. Aparatur Desa

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa, sekretaris desa, perangkat daerah, dan pelaksana teknis semuanya ditempatkan sebagai komponen pembantu kepala desa.

Sebagai kepala desa, ia bertanggung jawab untuk menentukan jenis sumber daya yang dibutuhkan desa, serta berapa banyak dan jenis sumber daya apa yang dibutuhkannya. Jika demikian halnya, kepala desa akan memilih calon perangkat desa berdasarkan kriteria yang telah ditetapkannya. Memiliki gelar sarjana terbaru atau pendidikan sekolah menengah, misalnya, dapat membantu meningkatkan sumber daya manusia perusahaan Anda.

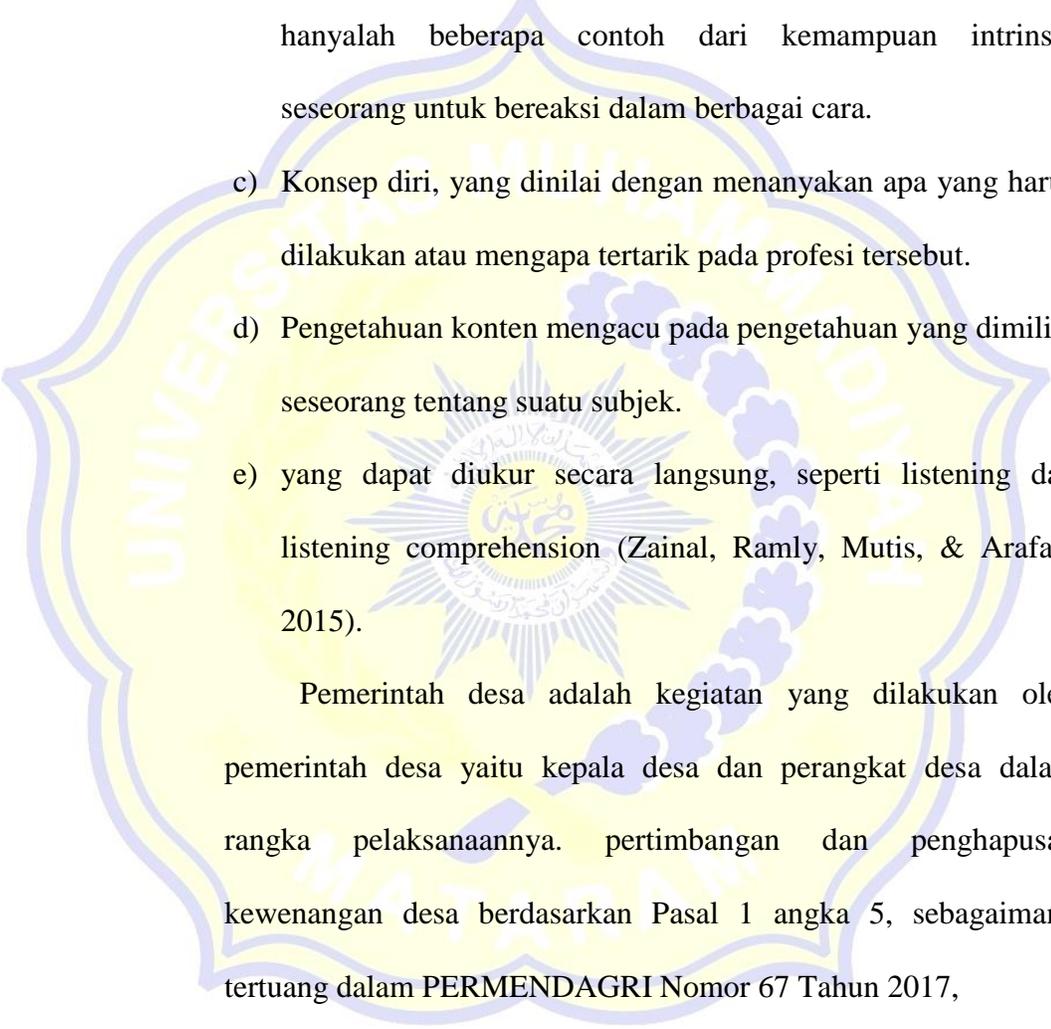
Pengembangan sumber daya manusia tidak selalu sesuai dengan kebutuhan rencana desa itu sendiri, dengan alasan atau alasan apapun. Dalam konteks sumber daya manusia, kemampuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi seseorang di bidang pekerjaan atau pekerjaan yang dimiliki saat ini sangat penting bagi perkembangan seseorang. Tugas yang harus diselesaikan membutuhkan bakat khusus, wawasan, pengetahuan, bakat dan potensi, kepribadian, etos kerja, dan sumber daya keuangan (Soeprapto, 2006).

Pelatihan dan pendidikan merupakan komponen penting dalam proses pengembangan sumber daya manusia karena menitikberatkan pada pengembangan kecerdasan dan kepribadian seseorang (Notoatmodjo, 2009).

Berikut ini adalah beberapa manfaat pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia:

- a) Dalam situasi ini, aparat desa yang memegang posisi tertentu dalam organisasi mungkin tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka.
- b) Seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, maka akan berdampak langsung pada suatu organisasi atau instansi.
- c) Jika suatu organisasi atau lembaga ingin berkembang maka harus berpromosi dari dalam (Notoatmodjo, 2009).

Pengembangan keterampilan sumber daya manusia meliputi pelatihan di bidang wawasan, bakat, potensi dan permodalan serta etos kerja dalam rangka membantu pemerintahan desa. Pengembangan sumber daya manusia perangkat desa sangat penting dilakukan jika organisasi ingin mencapai tujuannya. Karakteristik berikut mengungkapkan tingkat kompetensi setiap orang:

- 
- a) motivasi, seperti keinginan yang paling mendasar untuk mengarahkan dan memilih orang, seperti keinginan untuk sukses dalam usaha seseorang.
 - b) Keyakinan diri, pengendalian diri, dan manajemen stres hanyalah beberapa contoh dari kemampuan intrinsik seseorang untuk bereaksi dalam berbagai cara.
 - c) Konsep diri, yang dinilai dengan menanyakan apa yang harus dilakukan atau mengapa tertarik pada profesi tersebut.
 - d) Pengetahuan konten mengacu pada pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang suatu subjek.
 - e) yang dapat diukur secara langsung, seperti listening dan listening comprehension (Zainal, Ramly, Mutis, & Arafah, 2015).

Pemerintah desa adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa dalam rangka pelaksanaannya. pertimbangan dan penghapusan kewenangan desa berdasarkan Pasal 1 angka 5, sebagaimana tertuang dalam PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017,

- a. Tidak ada kepala desa.
- b. Sekretariat Desa, yang terdiri dari staf atau komponen pelayanan yang dipimpin oleh sekretaris desa; dan
 - 1. dewan desa, yang terdiri dari pejabat terpilih.

2. Unsur pembantu kepala desa yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan teknis di lapangan, seperti pengairan, keagamaan, dan lain-lain; 3) Tidak ada pelaksana teknis.
3. Unsur wilayah, seperti kepala dusun dan pembantu-pembantu lain kepada kepala desa di wilayah kerjanya.

2.2.4. Pelayanan Kependudukan

1. Pengertian Pelayanan

Untuk melayani kepentingan publik, penyedia layanan yang menawarkan layanan publik harus melakukannya dengan cara yang memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus melayani tujuan masyarakat. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 mendefinisikan pelayanan publik sebagai tindakan atau rangkaian kegiatan yang memenuhi tuntutan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atau penduduk atas produk, jasa, dan pelayanan administrasi yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan undang-undang.

Suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi tuntutan pengguna, menurut peraturan perundang-undangan, digambarkan sebagai pelayanan, kata AG. Subarsono (2008:65). Warga yang membutuhkan pelayanan publik seperti pembuatan akta kelahiran,

pembuatan KTP dan lain sebagainya merupakan bagian dari pelayanan masyarakat yang dibutuhkan oleh pengguna.

Kementerian Dalam Negeri, di sisi lain, mengatakan pelayanan publik adalah benar-benar pelayanan publik. Tugas seseorang adalah membantu orang yang membutuhkan dan membangun hubungan dengan mereka sehingga mereka bisa bahagia dan sukses. MEMILIKI. Pelayanan publik menurut Moenir (2007:2) adalah suatu upaya yang dilakukan oleh suatu kelompok atau individu untuk membantu masyarakat guna mencapai tujuan tertentu.

Dapat dikatakan bahwa pelayanan publik adalah kumpulan acara yang disponsori pemerintah di Desa Senayan, Kecamatan Poto Tano yang dirancang untuk menjawab tuntutan masyarakat akan layanan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Klasifikasi Pelayanan Publik

Layanan kebutuhan dasar dan layanan publik adalah dua jenis layanan besar yang wajib ditawarkan oleh pemerintah. Dengan kata lain, menurut Hardiyansyah (2011:20-23) dan Mahmudi,

1. Pelayanan Kebutuhan Dasar seperti:

- a) Konstitusi menjamin hak atas kesehatan bagi setiap warga negara Amerika, menjadikannya hak asasi manusia yang mendasar. Semua negara sepakat bahwa kesehatan adalah faktor terpenting dalam kemampuan suatu negara untuk

berkembang. Akibatnya, meningkatkan perawatan kesehatan adalah investasi dalam modal manusia yang akan mengarah pada masyarakat yang lebih sukses.

b) Berinvestasi dalam modal manusia adalah komponen kunci dari pendidikan dasar. Dengan seberapa besar kepedulian pemerintah terhadap pendidikan warganya, sebuah negara akan memiliki dampak yang sangat besar pada masa depannya. Pendidikan dasar adalah jenis pendidikan umum yang paling dasar. Pendidikan dasar adalah persyaratan hukum yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa semua anak memiliki akses ke sana. Ini akan membutuhkan peningkatan yang signifikan dalam pendanaan sekolah umum.

c) Kebutuhan Pokok Persediaan dan cadangan kebutuhan pokok harus dijaga di pasar dan di fasilitas penyimpanan untuk menjamin bahwa kebutuhan pokok masyarakat tidak ditagih berlebihan. Tujuannya adalah untuk menjaga agar masyarakat tidak menjadi khawatir tentang kekurangan kebutuhan pokok seperti makanan dan air, dan untuk memastikan tidak ada antrean panjang untuk menerimanya.

2. Adanya pelayanan publik. Pemerintah, dalam kapasitasnya sebagai penyedia layanan publik, bertanggung jawab untuk

memastikan bahwa warganya memiliki akses ke lebih dari sekadar kebutuhan dasar. Daftar layanan yang diamanatkan pemerintah meliputi:

- a) Dalam pelayanan administrasi, masyarakat diberikan berbagai surat-surat, seperti: Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, akta kematian, sertifikat tanah, Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dan sebagainya. .
- b) Produk jasa, seperti jaringan telepon, pasokan energi, dan pasokan air bersih, menyediakan berbagai macam barang yang dibutuhkan masyarakat.
- c) jasa, adalah jasa yang menyediakan berbagai macam barang dan jasa publik, seperti pendidikan tinggi dan menengah, perawatan kesehatan dan transportasi, layanan pos, penyehatan lingkungan, pengelolaan sampah dan drainase jalan dan trotoar, serta penanggulangan bencana.

Sedangkan jenis-jenis pelayanan publik menurut lembaga Administrasi Negara yang dimuat dalam Sankri Buku III dalam Hardiansyah (2011:24) adalah :

- a) Kartu identitas dan pajak, lisensi dan migrasi adalah contoh layanan pemerintah.

- b) Ketika datang untuk menyediakan fasilitas dan infrastruktur bagi penduduk, layanan pembangunan adalah semacam layanan yang disediakan oleh kotamadya. Semua fasilitas ini termasuk dalam layanan ini.
- c) Pasokan listrik, AC, layanan telepon, dan transportasi lokal adalah contoh layanan utilitas.
- d) Penyediaan beras, gula, minyak, gas, tekstil, dan rumah murah merupakan contoh sandang, pangan, dan papan yang menawarkan kebutuhan pokok bagi masyarakat.
- e) Kegiatan sosial kemasyarakatan termasuk pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, pekerjaan, penjara dan panti asuhan semuanya termasuk dalam kategori pengabdian masyarakat.

Karena begitulah perangkat desa senayan melayani masyarakat, maka diputuskan peneliti akan fokus pada pelayanan kependudukan desa senayan, seperti kriteria pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan surat-surat lainnya.

3. Administrasi Kependudukan

Administrasi Perkantoran, menurut Mariati Rahman (2017: 7), dalam arti yang lebih sempit, jadi (mencatat, mengetik, menggandakan, surat menyurat, dan sebagainya). administrasi adalah penyelenggaraan yang memadukan setiap organisasi yang bersih dan sistematis, serta

informasi tertulis, untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dan keterkaitan timbal balik antara fakta yang satu dengan fakta lainnya, menurut Reksohadiprawiro dalam Mariati Rahman (2017: 7). Dengan kata lain, administrasi dapat didefinisikan sebagai prosedur di mana dua atau lebih individu bekerja sama sesuai dengan rasio yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan bersama yang direncanakan.

Hukum Indonesia mendefinisikan administrasi kependudukan sebagai rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran, pencatatan sipil, pengelolaan dan penggunaan informasi administrasi kependudukan untuk pelayanan publik dan pembangunan di bidang lain, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Republik Indonesia

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Kependudukan menjelaskan dalam Pasal 3 ayat 2 bagaimana Pengelolaan Kependudukan dilaksanakan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi: a. koordinasi manajemen kependudukan pembentukan kantor yang tugas dan fungsinya di bidang Manajemen Kependudukan pengaturan teknis pelaksanaan Manajemen Kependudukan

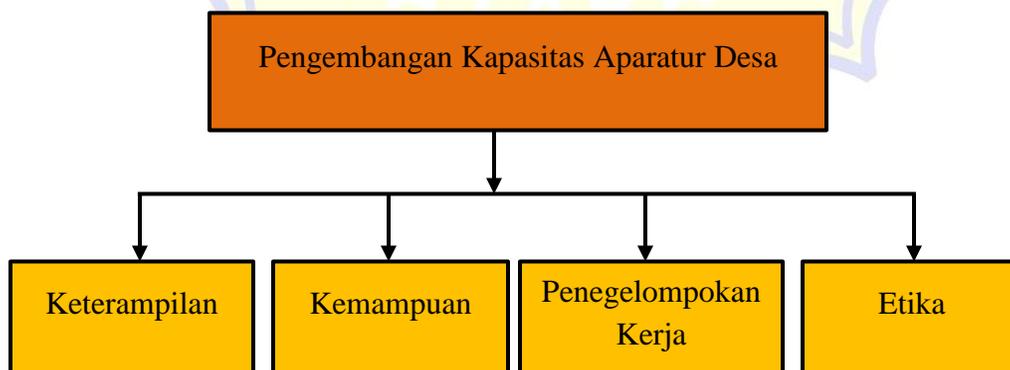
4. Asas-asas pelayanan publik

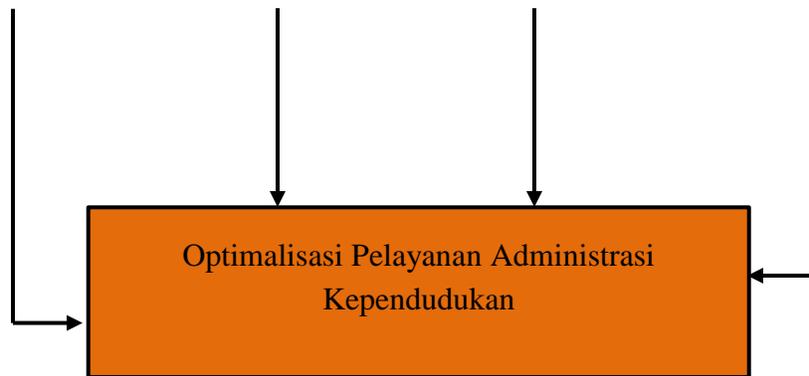
menurut Keputusan Menpan Nomor 63 tahun 2003 sebagai berikut:

- a) Keterbukaan. Ini terbuka, sederhana, dan tersedia untuk semua orang yang membutuhkannya, dan dijelaskan dengan jelas.
- b) Melacak hal-hal. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan hukum.
- c) Dengan berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas, penyedia dan pengguna layanan dapat memenuhi kebutuhannya.
- d) Terlibat. Memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan harapan masyarakat dalam melaksanakan pelayanan publik.
- e) Hak dan kewajiban yang sama bagi setiap orang. Hak dan tanggung jawab masing-masing pihak harus dipenuhi oleh penyedia dan penerima layanan.

2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.3
Kerangka berfikir





Sumber ; Sofyan Arif (2011:5.34

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik penelitian yang digunakan untuk menganalisis status benda alam didefinisikan sebagai kualitatif menurut Sugiyono (2015). Dimungkinkan untuk mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai sejenis analisis data induktif/kualitatif berdasarkan postpositivisme di mana peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dan analisis data induktif/kualitatif untuk menilai keadaan objek alami. keumuman.

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari bulan Oktober sampai dengan Februari lokasi penelitian ini dilaksanakan Pada Kantor Desa Senayan, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat.

3.3 Penentuan Narasumber

Istilah "informan" mengacu pada seseorang yang berpartisipasi dalam penelitian dengan memberikan rincian tentang diri mereka sendiri, serta rincian tentang orang atau peristiwa lain. Data atau informasi dapat dikumpulkan melalui penggunaan informan penelitian kualitatif. Akibatnya, kemampuan peneliti untuk "mengidentifikasi" dan "mendapatkan" informan sangat penting dalam penyelidikan ini. Memahami topik penelitian dan arsitektur komunitas di mana penelitian itu dilakukan dapat membantu peneliti mengidentifikasi informan. Peneliti harus terus berusaha mencari informan penelitian jika mereka tidak mengerti bagaimana struktur komunitas yang mereka teliti.

Pengambilan sampel purposive (purposive simple) adalah jenis pengambilan sampel yang diperbolehkan untuk kondisi yang unik, dan inilah yang saya maksud dengan pendekatan informan saya. Untuk memilih contoh yang relevan dengan tujuan penelitian, digunakan strategi pengambilan sampel yang dikenal sebagai "sampel bertarget" (Ahmadi 2014:85). Partisipan penelitian dipilih dengan menggunakan pendekatan proportional sampling, yang menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Kepala desa (satu orang)
2. Sekdes (satu orang)
3. Ketua BPD (satu orang)
4. Staf desa (dua orang)
5. Masyarakat (empat orang)

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

a. Data Primer

Informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dengan informan dan masyarakat umum di kantor Desa Senayan di Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat Kabupaten Sumbawa Barat merupakan sumber data utama penelitian ini.

b. Data Sekunder

Ada dua jenis data primer: data yang diterima langsung dari sumber asli (buku, jurnal, dll), dan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber primer (literatur, database, dll). Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pendisiplinan Aparatur Desa, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

3.4.2 Sumber Data

Itu hal yang bisa digunakan untuk mendapatkan data dalam penyelidikan ini. Sumber data disebut responden, yaitu individu yang menjawab atau menanggapi pertanyaan peneliti, baik tertulis maupun lisan, dalam bentuk angket atau wawancara. Sumber data bisa berupa benda bergerak atau proses tertentu jika peneliti menggunakan metode observasi.

Sumber data dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. Narasumber

Ini adalah orang yang mampu menyampaikan pengetahuan verbal tentang subjek yang menarik bagi narator.

b. Peristiwa

Pengamatan kejadian atau tindakan yang relevan dengan masalah studi juga dapat memberikan data atau pengetahuan. Penulis memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana segala sesuatu bekerja karena dia ada di sana untuk mengalaminya secara pribadi.

c. Dokumen

Istilah "dokumen" mengacu pada segala jenis materi tertulis atau fisik yang berkaitan dengan waktu atau tempat tertentu. Arsip, database, surat, dan foto semuanya berfungsi sebagai bentuk dokumentasi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Dua individu bertemu untuk berbagi informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga makna dapat dibangun dalam subjek yang dihadapi, seperti yang didefinisikan oleh Esterberg dalam Sugiyono (2015: 72). Wawancara

adalah metode pengumpulan informasi dengan mengajukan dan menjawab pertanyaan dari orang-orang yang dianggap ahli tentang materi pelajaran dan tantangan penelitian yang dihadapi.

Wawancara datang dalam berbagai bentuk, termasuk varietas terorganisir, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur yang disebutkan di atas. Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara dengan pertanyaan yang telah ditentukan. Sebagai metode pengumpulan data, wawancara terstruktur digunakan ketika pengumpul data atau peneliti sudah mengetahui informasi apa yang mereka cari. Akibatnya, pengumpulan data telah menyusun instrumen penelitian dalam bentuk pertanyaan tertulis, yang masing-masing memiliki seperangkat kemungkinan jawaban yang menyertainya. Sugyono (2015),

b. Observasi

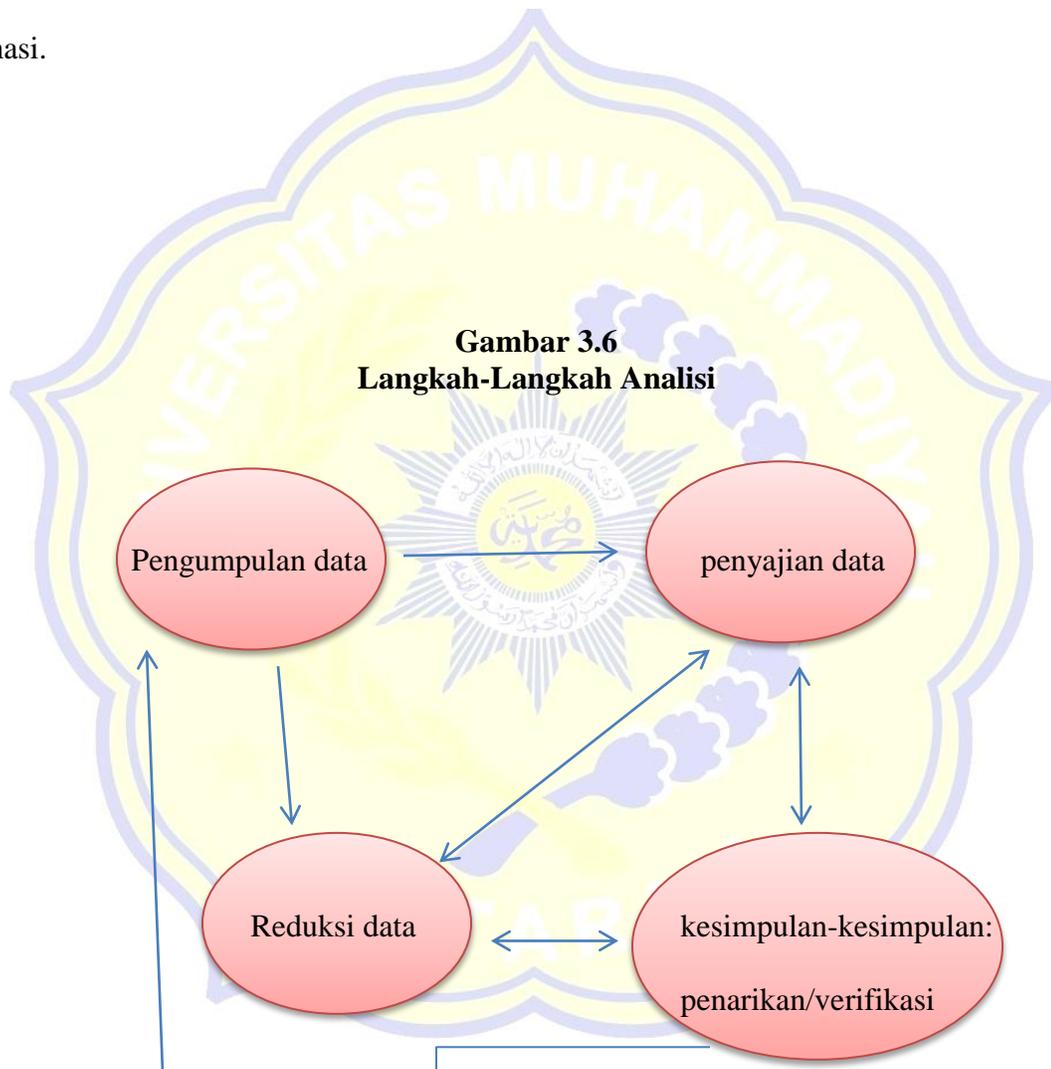
Observasi adalah dasar dari segala ilmu, menurut Nasution dalam Sugiyono (2015:64). Data, berupa pengamatan dunia nyata, merupakan satu-satunya sumber informasi yang dapat digunakan oleh para ilmuwan. Peneliti belajar tentang perilaku dan signifikansinya melalui observasi, menurut Marshall dalam Sugiyono (2015:64).

c. Dokumentasi

Pencarian, penyelidikan, pengumpulan, pengawetan, pengelolaan, penggunaan, dan pendistribusian makalah merupakan bagian dari proses pendokumentasian. Foto-foto dan media visual lainnya juga termasuk dalam koleksi.

3.6 Teknik Analisis Data

Kegiatan analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan, sehingga datanya jenuh, menurut Sugiyono (2015: 91-99). operasi seperti mereduksi data, menyajikan data, dan membuat kesimpulan/verifikasi hasil.



Sumber: Miles dan Huberman (1992: 20) Dalam Burhan Bungin (2007:180)

a) *Data Reduction* (Data Reduction)

Jumlah informasi yang dikumpulkan di lapangan membutuhkan pencatatan yang cermat.

b) *Data Display* (Data Presentation)

Deskripsi singkat, infografis, korelasi antar kategori, dan sebagainya merupakan contoh penyajian data dalam penelitian kualitatif. Dengan menggunakan teknik matriks dan diagram, Miles dan Huberman mengatakan, mereka tidak berusaha dalam bentuk naratif untuk menyampaikan topik karena mereka percaya bahwa presentasi dalam diagram dan matriks lebih berhasil. Meskipun berbentuk naratif, penulis di sini memanfaatkannya dengan baik dengan menjaga isinya tetap singkat, manis, dan to the point.

c) *Conclusion Drawing* /verifikasi

Menarik kesimpulan dan menggunakan tuas. Temuan pertama masih tentatif dan akan direvisi jika tidak ditemukan bukti lebih lanjut untuk mendukungnya.

Ada tiga langkah yang Miles dan Huberman sarankan untuk mengikuti metode pengumpulan data apa pun. Tidak ada akhir dari penyelidikan tingkat ketiga ini.

3.7 Uji Validitas Data

Dalam Sugiyono (2015:121-131). Uji keterpercayaan (validitas internal), keteralihan (validitas eksternal), ketergantungan (reliabilitas), dan konfirmasi (validitas konfirmasi) merupakan uji validitas data dalam penelitian kualitatif (objektivitas). Namun, percobaan kali ini dilakukan.

Peneliti hanya memanfaatkan kegiatan trigulasi untuk menguji data atau mempercayai data penelitian kualitatif. Dalam pengujian ini, data ditriangulasi dengan membandingkan hasil dari banyak sumber dan pada titik waktu yang berbeda.

a. Evaluasi Kasus Negatif

Kasus yang tidak cocok atau menyimpang dari temuan penelitian disebut sebagai "kasus negatif". Analisis kasus negatif menyiratkan menemukan data yang bertentangan dengan kesimpulan, namun jika peneliti masih menemukan bukti yang bertentangan dengan temuannya, ia akan mengubah temuannya.

b. Memperoleh Referensi dari Internet

Ketika kita berbicara tentang "bahan referensi", kita mengacu pada fakta bahwa temuan peneliti telah dikuatkan oleh orang lain. Sangat penting bagi peneliti dalam penelitian kualitatif untuk mendokumentasikan temuan mereka dengan menggunakan alat pengumpulan data seperti kamera, telepon, dan perekam suara.

c. melihat ini.

Data penyedia data diperiksa oleh peneliti member check. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah data yang diperoleh konsisten dengan informasi yang diberikan oleh sumber data. Dimungkinkan untuk melaksanakan inspeksi anggota setelah waktu pengumpulan data atau setelah kesimpulan telah dicapai.